



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025-2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu tertentu yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Oleh sebab itu Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai maksud dan tujuan sebagai implementasi atau penjabaran dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 ini menjabarkan program dan kegiatan yang merupakan prioritas bagi Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, tetapi mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 ini dapat terlaksana sesuai harapan dan tahapan yang telah dilalui serta memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya,

2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**



YUSRAN ANIZAM, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196906301989031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH	10
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	22
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	29
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	46
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	48
3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	48
3.2. ISU STRATEGIS	66
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	68
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	68
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	74
6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025-2026	74
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	94
BAB VIII PENUTUP	98



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Tabel 2.2	Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Pangkat/Golongan	24
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Jabatan/Eselon	25
Tabel 2.4	Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Tabel 2.5	Rekapitulasi Barang ke Neraca Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	28
Tabel 2.6	Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya .	30
Tabel 2.7	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode Rencana Strategis Tahun 2019-2024	32
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode Rencana Strategis Tahun 2019-2024	34
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	49
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	69
Tabel 4.2	Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	70
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	72
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	75
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026	95
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Output Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026	95
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Kunci Outcome Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	11
Gambar 2.2	Grafik Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Gambar 2.3	Grafik Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Pangkat / Golongan	24
Gambar 2.4	Grafik Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Jabatan / Eselon	26
Gambar 2.5	Grafik Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Jenis Kelamin	27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun tertentu. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap Perangkat Daerah dalam menjawab tuntutan lingkungan dan perkembangan wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diembannya.

Renstra memiliki peran yang sangat penting untuk menuntun Perangkat Daerah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki. Renstra menjadi kunci yang akan menunjukkan penjabaran kebijakan melalui rencana-rencana yang sangat prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, karena itu rencana-rencana dimaksud disertai dengan target yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata kebijakan yang diambil dapat diketahui pula pencapaiannya, dengan demikian penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel.

Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap warga negara, tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik “*Good Governance*” yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor



swasta dan masyarakat. Dengan demikian pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggung jawabkan segala sikap, prilaku dan kebijakan yang dibuat baik secara politik, hukum, maupun ekonomi dan di informasikan secara terbuka kepada publik.

Untuk mewujudkan *Clean and Good Governance* merupakan tantangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga keinginan masyarakat terhadap pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjadi kenyataan. Langkah yang perlu dan harus dikembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam rangka itu, cara pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang perlu dilakukan adalah membangun perubahan secara bersama-sama baik perubahan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kubu Raya, memerlukan tenaga yang memiliki kompetensi dan profesionalisme serta kinerja yang tinggi. Seluruh pegawai Sekretariat Daerah harus merespon perubahan lingkungan dan perkembangan wilayah yang demikian cepat, mampu menanggapi reformasi agar kesan masyarakat maupun kalangan swasta yang sering menilai birokrasi pemerintah sebagai birokrasi yang tidak efisien, lamban serta korup tidak lagi terjadi.

Proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- d. penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain:

- a. kemana pelayanan perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai;
- b. bagaimana mencapainya; dan
- c. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.



1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);



17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barta Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
34. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
35. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 10).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman umum bagi segenap pimpinan dan staf Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam menyusun kebijakan program, dan kegiatan yang berkaitan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026, sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam setiap tahunnya.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Menjamin terwujudnya konsistensi dan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam Penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang penyusunan rencana strategis, landasan hukum, maksud dan



tujuan, dan sistematika penulisan penyusunan rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan struktur organisasi, serta menjabarkan tugas dan fungsi masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, digambarkan pula kondisi sumber daya manusia berdasarkan klasifikasinya serta sarana dan prasarana yang terdapat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Kemudian dijelaskan tentang kinerja pelayanan Sekretariat Daerah yang telah dicapai pada periode sebelumnya dan capaian kinerja dan keuangan yang telah dicapai pada periode yang telah berlalu serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi penjelasan tentang tujuan dan sasaran sesuai tugas, pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya serta indikator kinerja dan target yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan agar terdapat kesamaan persepsi bagi para pengguna dalam memahami substansi dokumen rencana strategis.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menerangkan tentang rencana strategis dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang rumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya kedepan.



BAB VII KERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB VIII PENUTUP

Bab penutup ini berisi uraian kesimpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

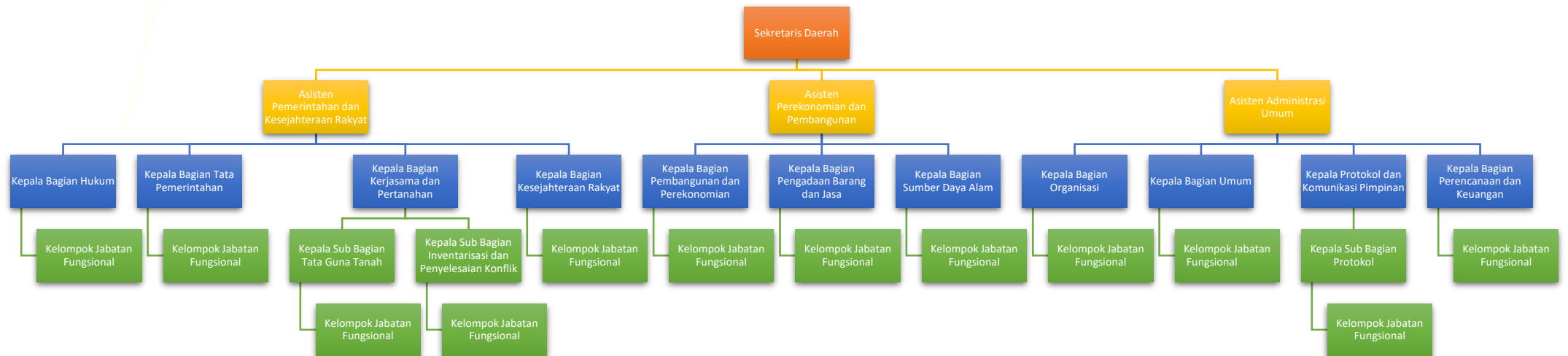
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mempawah. Tujuan utama pemekaran Kabupaten ini adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat cepat terwujud dengan memperlancar pelayanan terhadap masyarakat dengan mendekatkan pusat kekuasaan pada wilayah-wilayah yang melingkupi kabupaten ini. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan perangkat daerah melaksanakan kewenangan otonomi dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 dirubah kedalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 dan dirubah kembali dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 akibat dari Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, dengan tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, asisten dan staf ahli serta pelayanan administratif.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



Sumber: Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Sekretaris Daerah dibantu 3 (tiga) asisten, yaitu:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 4 (empat) Bagian, yaitu:

1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Hukum
3. Bagian Kerjasama dan Pertanahan dengan 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Tata Guna Tanah
 - 2) Sub Bagian Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu:

- a. Bagian Pembangunan dan Perekonomian
- b. Bagian Sumber Daya Alam
- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian, yaitu:

- a. Bagian Organisasi
- b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan 1 (satu) Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Protokol
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- d. Bagian Umum

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

a. SEKRETARIS DAERAH

Tugas Pokok

Sekretaris Daerah adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan serta melaporkan kegiatan Sekretariat Daerah

berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Asisten dan Staf Ahli;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tugas pokok

Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi, perumusan, pembinaan, pengarahan, penyelenggaraan dan evaluasi kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum serta Bagian Kerjasama dan Pertanahan.

Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijakan di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum serta kerjasama dan pertanahan.

c. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Tata Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendali kegiatan di Bagian Tata Pemerintahan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Tata Pemerintahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. BAGIAN HUKUM

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Hukum;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Hukum sesuai lingkup tugasnya;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Hukum;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Hukum; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. BAGIAN KERJASAMA DAN PERTANAHAN

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas kerjasama dalam negeri, luar negeri dan evaluasi, tata guna tanah serta inventarisasi dan penyelesaian konflik.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Kerjasama dan Pertanahan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Kerjasama dan Pertanahan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Kerjasama dalam negeri, luar negeri dan evaluasi, tata guna tanah serta inventarisasi dan penyelesaian konflik;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Kerjasama dan Pertanahan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Kerjasama dan Pertanahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Tugas Pokok

Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi, perumusan, pembinaan, pengarahan, penyelenggaraan dan evaluasi kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Bagian Sumber Daya Alam.

Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

- tujuan kebijakan di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang pembangunan dan perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

h. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang administrasi pembangunan, pembinaan BUMD, BLUD, perencanaan dan pengawasan usaha mikro, serta pengendalian dan distribusi perekonomian.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Pembangunan dan Perekonomian;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Pembangunan dan Perekonomian sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, pembinaan BUMD, BLUD, perencanaan dan pengawasan usaha mikro, serta pengendalian dan distribusi perekonomian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Pembangunan dan Perekonomian;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Pembangunan dan Perekonomian; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam energi dan air.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Sumber Daya Alam;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Sumber Daya Alam sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam energi dan air;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Sumber Daya Alam;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Sumber Daya Alam; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan LPSE, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan LPSE, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Tugas Pokok

Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi, perumusan, pembinaan, pengarahan, penyelenggaraan dan evaluasi kebijakan daerah di Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan daerah di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

1. BAGIAN ORGANISASI

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Organisasi;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Organisasi sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Organisasi;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Organisasi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

m. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang protocol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

n. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o. BAGIAN UMUM

Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Fungsi

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Umum;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan, pengendalian dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Umum sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Umum;

- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Umum; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

p. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan teknis berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu yang dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada. Dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tepat, maka sumber daya manusia tersebut dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta bertanggung jawab sehingga menghasilkan keluaran yang berkualitas dan sangat memuaskan juga.

Berikut disampaikan data terkait sumber daya aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/golongan, eselon, dan berdasarkan jenis kelamin dari masing-masing perangkat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

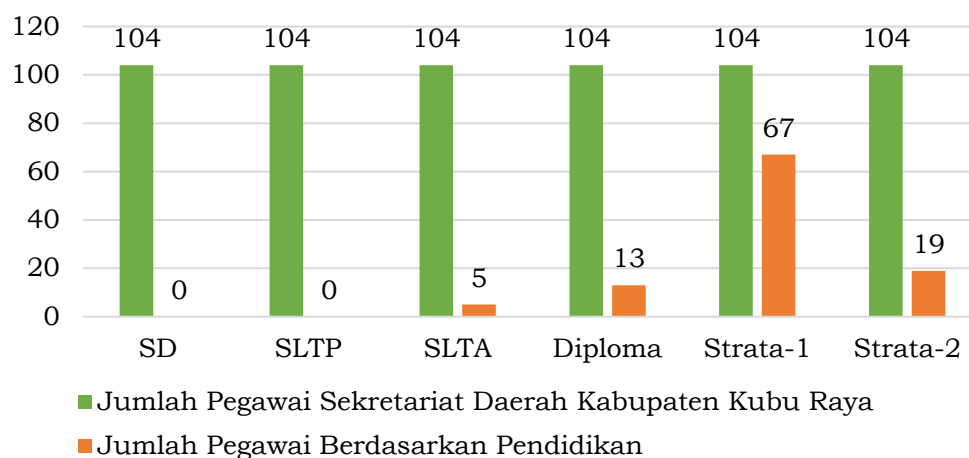
Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Perangkat	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Diploma	S-1	S-2	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	1	1
2	Asisten	-	-	1	2	3
3	Staf Ahli	-	-	2	1	3
4	Bagian Tata Pemerintahan	1	-	8	1	10
5	Bagian Hukum	-	1	9	-	10

6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	-	6	-	7
7	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	-	-	5	1	6
8	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	1	-	4	1	6
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	1	13	1	15
10	Bagian Sumber Daya Alam	-	1	1	1	3
11	Bagian Umum	-	3	3	3	9
12	Bagian Organisasi	1	-	4	5	10
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	2	6	1	10
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	5	5	1	11
Jumlah		5	13	67	19	104

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya per 31 Desember 2023

Gambar 2.2
Grafik Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan Tabel 2.1 dan Gambar 2.2 diatas, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2023 memiliki jenjang pendidikan perguruan tinggi yang

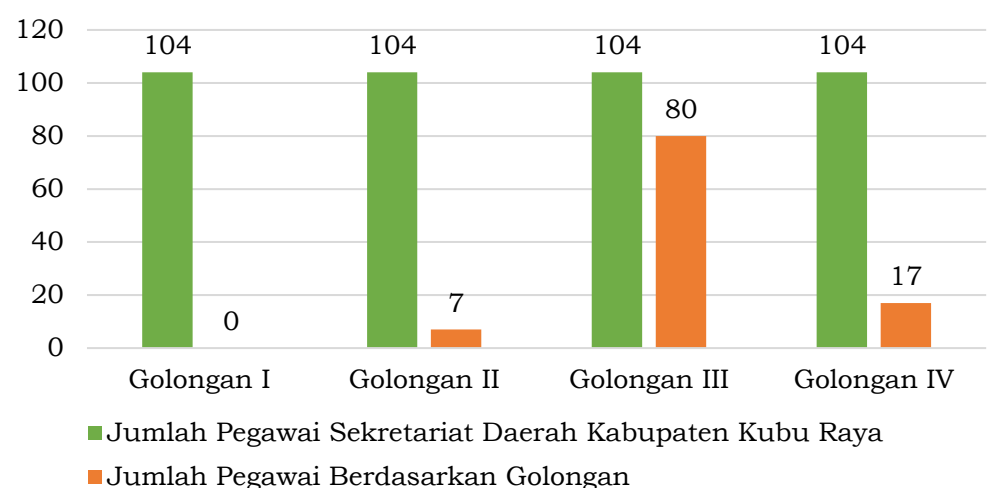
sangat baik yaitu Sarjana tingkat Strata 1 (S-1) sebanyak 67 orang atau 64,42%, Strata 2 (S-2) sebanyak 19 orang yaitu 18,27%. Jadi secara umum sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sudah sangat baik.

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Perangkat	Pangkat/Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	1	1
2	Asisten	-	-	-	3	3
3	Staf Ahli	-	-	-	3	3
4	Bagian Tata Pemerintahan	-	1	8	1	10
5	Bagian Hukum	-	-	9	1	10
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	1	5	1	7
7	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	-	-	5	1	6
8	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	-	-	5	1	6
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	14	1	15
10	Bagian Sumber Daya Alam	-	-	2	1	3
11	Bagian Umum	-	4	4	1	9
12	Bagian Organisasi	-	-	9	1	10
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	10	-	10
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	1	9	1	11
Jumlah		-	7	80	17	104

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya per 29 Desember 2023

Gambar 2.3
Grafik Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Pangkat/Golongan



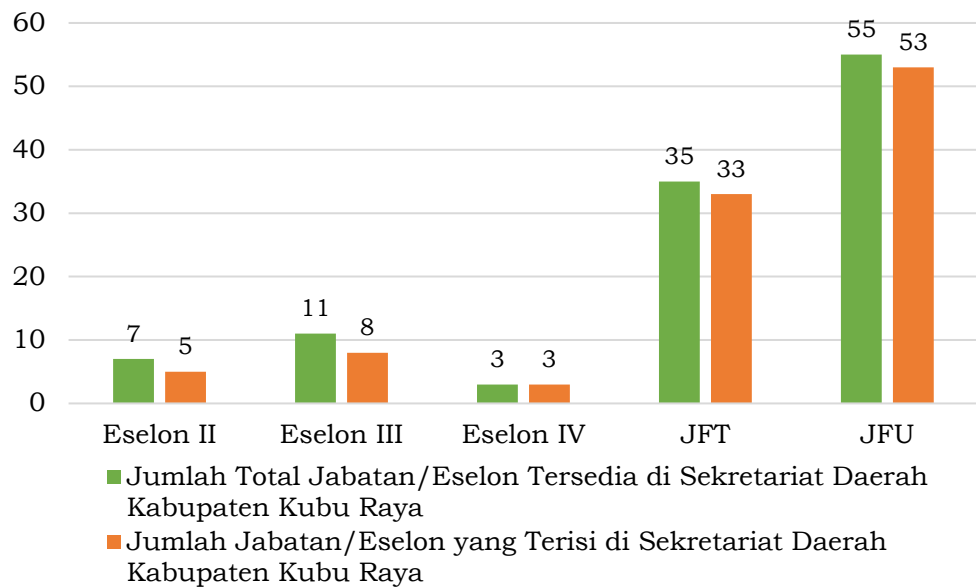
Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.3 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2023 berdasarkan pangkat/golongan sudah sangat baik, dimana dengan kondisi saat ini akan sangat memudahkan dalam pengisian jabatan.

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Perangkat	Jabatan/Eselon					Jumlah
		JFU	JFT	IV	III	II	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	1	1
2	Asisten I, II, dan III	-	-	-	-	3	3
3	Staf Ahli Bupati	-	-	-	-	3	3
4	Bagian Tata Pemerintahan	6	3	-	1	-	10
5	Bagian Hukum	6	3	-	1	-	10
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4	3	-	-	-	7
7	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	2	1	2	1	-	6
8	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	2	3	-	1	-	6
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	7	7	-	1	-	15
10	Bagian Sumber Daya Alam	1	2	-	-	-	3
11	Bagian Umum	5	3	-	1	-	9
12	Bagian Organisasi	6	3	-	1	-	10
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7	2	1	-	-	10
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	3	-	1	-	11
Jumlah		53	33	3	8	7	104

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya per 31 Desember 2023

Gambar 2.4
Grafik Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Jabatan/Eselon



Berdasarkan Tabel 2.3 dan Gambar 2.4 dapat dijelaskan bahwa jumlah jabatan eselon di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berjumlah 21 (dua puluh satu) jabatan. Yang terdiri dari 7 (tujuh) jabatan untuk eselon II yaitu 1 (satu) jabatan Sekretaris Daerah, 3 (tiga) jabatan Asisten, 3 (tiga) jabatan Staf Ahli. 11 (sebelas) jabatan untuk eselon III yaitu 11 (sebelas) jabatan Kepala Bagian, dan 3 (tiga) jabatan untuk eselon IV yaitu 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian.

Adapun dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat kekosongan pada jabatan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Bagian Sumber Daya Alam. Kekosongan tersebut dikarenakan pelaksana jabatan tersebut telah memasuki masa purna tugas.

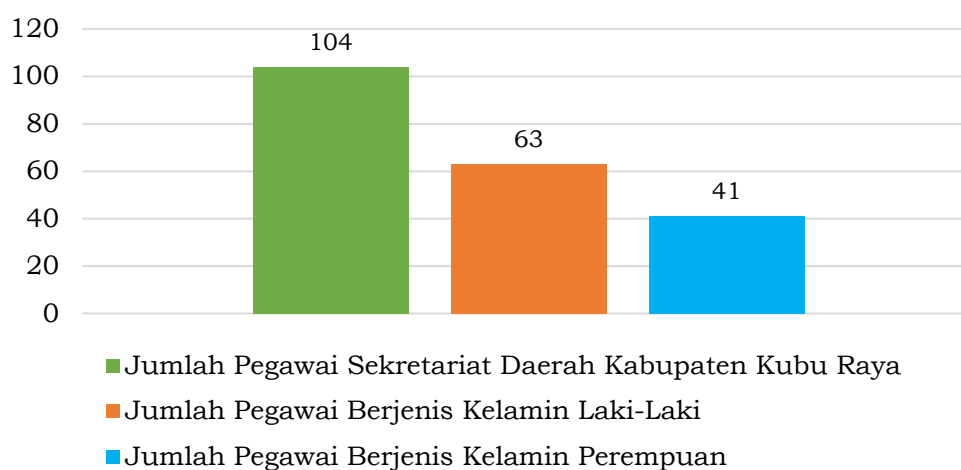
Tabel 2.4
Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPK)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Perangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Asisten I, II, dan III	2	1	3
3	Staf Ahli Bupati	2	1	3
4	Bagian Tata Pemerintahan	8	2	10
5	Bagian Hukum	3	7	10

6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5	2	7
7	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	4	2	6
8	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	4	2	6
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	10	5	15
10	Bagian Sumber Daya Alam	2	1	3
11	Bagian Umum	6	3	9
12	Bagian Organisasi	5	5	10
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7	3	10
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	6	11
Jumlah		63	41	104

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya per 29 Desember 2023

Gambar 2.5
Grafik Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Tabel 2.4 dan Gambar 2.4 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan kesetaraan gender sehingga perbedaan jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh berbeda. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dengan persentase sebesar 60,78% dan perempuan sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan persentase sebesar 39,22%.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya secara umum belum tercukupi secara maksimal. Untuk mengatasinya,

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berusaha melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Barang Ke Neraca
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1.3.	Aset Tetap	3.013	118.927.579.882
1.3.1.	Tanah	46	42.860.662.354
1.3.1.01.	Tanah	46	42.860.662.354
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	2.948	26.581.203.410
1.3.2.01.	Alat Besar	37	3.071.435.119
1.3.2.02.	Alat Angkutan	74	10.433.283.204
1.3.2.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	24.475.000
1.3.2.04.	Alat Pertanian	1	4.585.000
1.3.2.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.213	7.470.951.320
1.3.2.06.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	155	2.063.446.731
1.3.2.08.	Alat Laboratorium	88	362.533.700
1.3.2.09.	Alat Persenjataan	4	62.655.150
1.3.2.10.	Komputer	359	2.995.768.186
1.3.2.15.	Alat Keselamatan Kerja	10	92.070.000
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	12	47.607.106.788
1.3.3.01.	Bangunan Gedung	11	46.173.171.788
1.3.3.02.	Monumen	1	1.433.935.000
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5	1.868.657.330
1.3.4.02.	Bangunan Air	1	985.022.037
1.3.4.04.	Jaringan	4	883.635.293
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	2	9.950.000
1.3.5.01.	Bahan Perpustakaan	1	9.950.000
1.3.5.07.	Aset Tetap Dalam Renovasi	1	0
1.5.	Aset Lainnya	2	60.430.000

1.5.3.	Aset Berwujud	Tidak	2	60.430.000
1.5.3.01.	Aset Berwujud	Tidak	2	60.430.000

Sumber: Laporan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dipahami bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis serta menyelenggarakan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup tugas, yang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) peran utama yaitu:

1. Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

2. Pelayanan Sebagai Koordinator Pembangunan Daerah

Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

3. Pelayanan Administrasi

Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.6
Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produk Hukum yang diselesaikan: - Peraturan Daerah (Dokumen) - Peraturan Bupati (Dokumen) - Surat Keputusan Bupati (Dokumen)	16 117 918	8 113 1026	12 115 975	12 91 855	19 81 798
2.	Penyelesaian Permasalahan Hukum yang difasilitasi (Kasus)	1	2	1	1	6
3.	Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara e-Procurement (Paket)	28	86	92	72	791
4.	Jamaah Haji yang Difasilitasi dan Diberangkatkan (Orang)	318	0 (Covid-19)	0 (Covid-19)	139	320
5.	Fasilitasi Kontingen MTQ (Orang)	0	52	72	59	90
6.	Rumah Ibadah yang diberikan Bantuan (Rumah Ibadah)	n/a	n/a	n/a	n/a	89
7.	Pemberian Insentif terhadap: - Fardhu Kifayah (Orang) - Guru Ngaji (Orang)	485 1060	485 1060	485 1060	485 1060	490 1066
8.	Pemberian Jaminan Sosial BPJS	n/a	n/a	n/a	n/a	7544

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Rentan (Orang)					
9.	Konflik Masalah Pertanahan yang Diselesaikan (Kasus)	12	12	12	12	16
10.	Kerjasama Pemerintah Daerah yang direalisasikan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (Dokumen Perjanjian Kerjasama)	32	26	26	77	20
11.	Pengadaan OPD melalui Lelang yang diselesaikan (Paket)	111	72	228	172	114
12.	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kegiatan)	1164	1104	1044	1212	1080

Dari tabel 2.6 diatas, secara keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan terhadap publik dan masyarakat baik dari unsur pemerintahan daerah dan unsur masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Terkait capaian “n/a” itu dikarenakan pada tahun tersebut kegiatan belum/tidak dilaksanakan, dan salah satunya akibat dari pandemi *Covid-19* sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut batal untuk dilaksanakan.

Tabel 2.7
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Periode Rencana Strategis Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Reformasi Birokrasi				B	B	-	-	-	CC (50,35)	CC (51,56)	-	-	-	0	0	-	-	-
2	Nilai AKIP				B	B	B	BB (71,20)	BB (71,30)	A (82,00)	A (80,01)	BB (71,50)	BB (75,30)	n/a	100	100	100	100	n/a
3	Indeks Kepuasan Masyarakat				B	B	B	B (85,80)	B (86,00)	B (83,48)	B (84,14)	B (85,80)	B (86,80)	n/a	100	100	100	100	n/a

Dari tabel 2.5 diatas, secara rata-rata realisasi capaian kinerja perangkat daerah telah tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa catatan dari tabel diatas antara lain:

1. Tidak ditetapkannya Indeks Reformasi Birokrasi sebagai Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dikarenakan perubahan sasaran strategis pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang diatur didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan (RPJMD-P) yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021.
2. Perubahan target pada indikator Nilai AKIP di tahun 2022 akibat dari perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021.

3. Pada tahun 2020 terdapat penurunan untuk nilai AKIP dari tahun 2019, yaitu dari 82,00 ke 80,01 atau sebesar 1,99 poin. Penurunan ini memang dikarenakan masih kurangnya kelengkapan / bukti fisik dari pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah. Adapun penurunan tersebut diakibatkan pula masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan serta masih kurangnya sumber daya aparatur dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan sudah berpengalaman dibidang yang ditanganinya.
4. Terkait indikator Indeks Reformasi Birokrasi, pada tahun 2019 dan 2020 di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya menggunakan indikator milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Untuk realisasi dan rasio capaian kinerja tahun 2023 belum dapat diketahui nilainya. Ini dikarenakan hingga dokumen ini selesai disusun, penilaian belum dilaksanakan. Penilaian dilakukan setelah tahun 2023 berakhir dan dilakukan penilaian pada tahun 2024 berjalan. Adapun untuk penilaian nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya, dan untuk penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Periode Rencana Strategis Tahun 2019-2024

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,584,577,800	5,080,357,575	-	-	-	5,273,137,228	4,796,054,685	-	-	-	94.42	94.40	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,018,400,000	1,131,400,000	-	-	-	883,822,728	962,774,931	-	-	-	86.79	85.10	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	35,000,000	59,500,000	-	-	-	18,901,500	39,339,800	-	-	-	54.00	66.12	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	14,100,000	9,000,000	-	-	-	14,100,000	9,000,000	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	437,600,000	474,255,000	-	-	-	374,663,000	468,775,000	-	-	-	85.62	98.84	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	96,691,800	65,721,900	-	-	-	96,642,600	65,351,350	-	-	-	99.95	99.44	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,620,000	52,100,000	-	-	-	65,239,900	52,043,300	-	-	-	99.42	99.89	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60,000,000	50,000,000	-	-	-	54,668,000	49,984,200	-	-	-	91.11	99.97	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,000,000	74,300,000	-	-	-	199,969,000	56,935,000	-	-	-	99.98	76.63	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	79,920,000	79,920,000	-	-	-	79,920,000	79,920,000	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	2,290,500,000	1,914,500,000	-	-	-	2,200,373,000	1,843,113,800	-	-	-	96.07	96.27	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Rapat, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	801,046,000	691,690,000	-	-	-	801,046,000	691,687,804	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Rapat, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	335,700,000	327,970,675	-	-	-	334,175,000	327,825,000	-	-	-	99.55	99.96	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan Asisten Pemerintahan	150,000,000	150,000,000	-	-	-	149,616,500	149,304,500	-	-	-	99.74	99.54	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8,169,140,000	4,224,766,250	-	-	-	6,439,666,643	4,054,301,765	-	-	-	78.83	95.97	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	5,768,000,000	440,000,000	-	-	-	4,607,158,000	433,000,000	-	-	-	79.87	98.41	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	398,500,000	-	-	-	-	361,778,900	-	-	-	-	90.79	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	492,700,000	903,342,000	-	-	-	396,928,000	879,942,200	-	-	-	80.56	97.41	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Pengadaan Meubeleur	241,500,000	289,776,250	-	-	-	233,788,593	288,391,000	-	-	-	96.81	99.52	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20,400,000	20,400,000	-	-	-	16,200,000	20,400,000	-	-	-	79.41	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50,000,000	536,000,000	-	-	-	47,175,000	529,265,355	-	-	-	94.35	98.74	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,188,000,000	1,351,400,000	-	-	-	866,461,650	1,266,995,950	-	-	-	72.93	93.75	-	-	-	-100.00%	-100.00%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	334,000,000	253,600,000	-	-	-	202,712,400	242,785,360	-	-	-	60.69	95.74	-	-	-	-100.00%	-100.00%

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	30,000,000	31,748,000	-	-	-	25,700,000	31,743,000	-	-	-	85.67	99.98	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Radio SSB dan 2 Meter Band	44,540,000	-	-	-	-	43,543,000	-	-	-	-	97.76	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	623,237,800	255,295,700	-	-	-	621,513,150	254,724,300	-	-	-	99.72	99.78	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	259,475,000	168,025,000	-	-	-	259,201,350	167,760,600	-	-	-	99.89	99.84	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Bupati	162,620,000	60,850,000	-	-	-	162,195,000	60,625,000	-	-	-	99.74	99.63	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	151,701,200	-	-	-	-	150,711,200	-	-	-	-	99.35	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Workshop Implementasi Proses Pengadaan Barang/Jasa	49,441,600	1,118,400	-	-	-	49,405,600	1,118,400	-	-	-	99.93	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan	-	25,302,300	-	-	-	-	25,220,300	-	-	-	-	99.68	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	210,043,900	192,390,750	-	-	-	202,676,000	186,334,600	-	-	-	96.49	96.85	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	-	4,783,850	-	-	-	-	4,783,400	-	-	-	-	99.99	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4,750,000	6,181,700	-	-	-	670,000	6,181,400	-	-	-	14.11	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,600,000	9,957,100	-	-	-	5,389,000	8,516,700	-	-	-	94.88	85.53	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	8,870,000	39,352,550	-	-	-	8,696,000	37,642,550	-	-	-	98.04	95.65	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD	3,430,000	7,055,650	-	-	-	3,124,000	7,055,650	-	-	-	91.08	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan SKPD	2,920,000	-	-	-	-	2,869,000	-	-	-	-	98.25	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten	184,393,900	125,059,900	-	-	-	181,928,000	122,154,900	-	-	-	98.66	97.68	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	90,000,000	53,225,950	-	-	-	85,431,000	52,686,150	-	-	-	94.92	98.99	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral	90,000,000	53,225,950	-	-	-	85,431,000	52,686,150	-	-	-	94.92	98.99	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	39,371,500	3,890,000	-	-	-	39,204,300	3,890,000	-	-	-	99.58	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pameran / Expo	39,371,500	3,890,000	-	-	-	39,204,300	3,890,000	-	-	-	99.58	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	150,000,000	-	-	-	-	149,896,750	-	-	-	-	99.93	0.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	150,000,000	-	-	-	-	149,896,750	-	-	-	-	99.93	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	4,048,523,700	879,759,400	-	-	-	3,885,628,625	709,738,690	-	-	-	95.98	80.67	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Sertifikasi Tanah Masyarakat (PRODA)	41,310,800	98,880,600	-	-	-	41,310,800	33,615,600	-	-	-	100.00	34.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Sertifikasi Tanah Pemerintah	376,534,800	720,937,200	-	-	-	330,646,700	625,731,590	-	-	-	87.81	86.79	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Pemerintah dan Kepentingan Umum	3,287,340,000	-	-	-	-	3,201,249,325	-	-	-	-	97.38	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Sosialisasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	42,788,500	22,475,800	-	-	-	42,308,500	22,252,300	-	-	-	98.88	99.01	-	-	-	-100.00%	-100.00%

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah	300,549,600	37,465,800	-	-	-	270,113,300	28,139,200	-	-	-	89.87	75.11	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinmas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	2,960,315,000	1,679,973,325	-	-	-	2,928,422,400	1,676,014,300	-	-	-	98.92	99.76	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Dialog Audiensi Dengan Tokoh tolok Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	451,720,000	222,425,000	-	-	-	451,586,000	220,650,000	-	-	-	99.97	99.20	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non Departemen / Luar Negeri	389,535,000	253,760,000	-	-	-	358,590,000	253,635,000	-	-	-	92.06	99.95	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	386,375,000	-	-	-	-	385,666,400	-	-	-	-	99.82	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	1,337,910,000	610,180,000	-	-	-	1,337,910,000	608,967,900	-	-	-	100.00	99.80	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	394,775,000	313,608,325	-	-	-	394,670,000	313,455,000	-	-	-	99.97	99.95	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan Keprotokolan	-	280,000,000	-	-	-	-	279,306,400	-	-	-	-	99.75	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	194,824,800	37,676,500	-	-	-	192,318,600	35,426,000	-	-	-	98.71	94.03	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	84,875,000	-	-	-	-	84,515,600	-	-	-	-	99.58	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas Penataan Aset pada SKPD	9,997,950	9,997,950	-	-	-	9,037,950	9,997,950	-	-	-	90.40	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	29,601,850	27,678,550	-	-	-	29,444,850	25,428,050	-	-	-	99.47	91.87	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Serapan Anggaran	70,350,000	-	-	-	-	69,320,200	-	-	-	-	98.54	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	474,062,500	575,288,400	-	-	-	468,549,550	520,134,000	-	-	-	98.84	90.41	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	356,616,000	205,937,000	-	-	-	354,066,000	201,745,000	-	-	-	99.28	97.96	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Irin Lokasi	117,446,500	115,576,400	-	-	-	114,483,550	111,651,400	-	-	-	97.48	96.60	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Lokakarya Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	-	112,232,000	-	-	-	-	74,052,000	-	-	-	-	65.98	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Tanah Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial Serta Tanah Milik Pemerintah Daerah	-	141,543,000	-	-	-	-	132,685,600	-	-	-	-	93.74	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	2,457,116,000	1,838,687,300	-	-	-	2,441,461,650	1,784,480,041	-	-	-	99.36	97.05	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	597,760,700	407,772,900	-	-	-	594,456,650	388,386,450	-	-	-	99.45	95.25	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Publikasi Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektronik	1,282,827,000	1,198,227,000	-	-	-	1,282,368,400	1,184,171,191	-	-	-	99.96	98.83	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyebarluasan Informasi	317,698,800	133,450,900	-	-	-	310,848,700	117,245,900	-	-	-	97.69	87.86	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penerbitan Buletin	121,633,000	99,236,500	-	-	-	119,403,000	94,676,500	-	-	-	98.17	95.40	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kehumasan	137,196,500	-	-	-	-	134,884,900	-	-	-	-	98.32	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Implementasi LPSE	1,195,159,400	905,364,600	-	-	-	1,023,933,550	898,424,200	-	-	-	85.67	99.23	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Operasional dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung LPSE	-	142,944,400	-	-	-	-	136,784,000	-	-	-	-	95.69	-	-	-	-100.00%	-100.00%

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

Kegiatan Layanan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Melalui LPSE	799,547,400	591,967,600	-	-	-	630,132,400	591,710,300	-	-	-	78.81	99.96	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	31,757,000	27,926,750	-	-	-	31,479,200	27,862,550	-	-	-	99.13	99.84	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Temu Nasional / Rakornas Ahli Pengadaan Barang / Jasa	34,500,000	705,500	-	-	-	34,490,500	705,500	-	-	-	99.97	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa	329,355,000	72,367,450	-	-	-	327,831,450	72,156,750	-	-	-	99.54	99.71	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi LPSE Kabupaten Kubu Raya	-	23,259,500	-	-	-	-	22,991,700	-	-	-	-	98.85	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ dan Standarisasi LPSE	-	46,193,400	-	-	-	-	46,193,400	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	455,522,900	236,664,450	-	-	-	389,787,750	225,478,350	-	-	-	85.57	95.27	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan SKPD	6,550,000	-	-	-	-	5,989,000	-	-	-	-	91.44	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	7,220,000	7,220,300	-	-	-	6,893,000	7,220,300	-	-	-	95.47	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten	178,000,000	105,322,000	-	-	-	140,012,000	99,126,250	-	-	-	78.66	94.12	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten	155,000,000	90,296,200	-	-	-	130,905,250	85,305,850	-	-	-	84.46	94.47	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas e-LAKIP	28,583,000	-	-	-	-	28,583,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Daerah	80,169,900	33,825,950	-	-	-	77,405,500	33,825,950	-	-	-	96.55	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial	5,154,839,000	5,032,770,550	-	-	-	5,131,663,700	4,976,424,500	-	-	-	99.55	98.88	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas Petugas Fardhu Hidayah dan Guru Ngaji	5,154,839,000	5,032,770,550	-	-	-	5,131,663,700	4,976,424,500	-	-	-	99.55	98.88	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	184,456,500	161,626,900	-	-	-	180,609,400	156,835,000	-	-	-	97.91	97.04	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyuluhan Hukum	-	24,800,000	-	-	-	-	24,800,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan RANHAM	111,094,000	22,319,400	-	-	-	108,391,900	22,319,400	-	-	-	97.57	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN	73,362,500	-	-	-	-	72,217,500	-	-	-	-	98.44	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum	-	114,507,500	-	-	-	-	109,715,600	-	-	-	-	95.82	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	679,290,000	1,550,045,900	-	-	-	662,060,800	1,547,119,750	-	-	-	97.46	99.81	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah pada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia	174,775,000	54,364,800	-	-	-	174,120,200	54,353,600	-	-	-	99.63	99.98	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Daerah / Instansi / Lembaga	73,100,000	225,520,000	-	-	-	72,000,200	224,656,400	-	-	-	98.50	99.62	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)	79,283,000	47,090,400	-	-	-	76,869,200	47,090,050	-	-	-	96.96	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	352,132,000	1,153,353,000	-	-	-	339,071,200	1,151,827,000	-	-	-	96.29	99.87	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah / Instansi / Lembaga	-	69,717,700	-	-	-	-	69,192,700	-	-	-	-	99.25	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Penetapan Peraturan Perundang-Undangan	1,191,319,850	912,520,100	-	-	-	1,154,886,200	897,512,400	-	-	-	96.94	98.36	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	314,675,900	-	-	-	-	298,502,900	-	-	-	-	94.86	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	269,279,500	239,091,800	-	-	-	263,440,700	233,087,600	-	-	-	97.83	97.49	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Dokumentasi Hukum	88,417,000	9,932,000	-	-	-	82,084,300	9,932,000	-	-	-	92.84	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Pengkajian Produk-Produk Hukum	172,916,000	368,717,500	-	-	-	168,153,400	363,714,000	-	-	-	97.25	98.64	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum	23,761,000	34,428,000	-	-	-	22,361,000	34,428,000	-	-	-	94.11	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Keluarga Sader Hukum	19,030,000	31,943,000	-	-	-	18,818,000	31,943,000	-	-	-	98.89	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah	65,735,900	-	-	-	-	65,186,900	-	-	-	-	99.16	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Sistem Informasi Hukum	52,979,000	27,629,000	-	-	-	52,079,000	27,629,000	-	-	-	98.30	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa	184,525,550	181,814,400	-	-	-	184,260,000	177,814,400	-	-	-	99.86	97.80	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	-	18,964,400	-	-	-	-	18,964,400	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	700,244,800	246,311,000	-	-	-	614,961,950	230,566,450	-	-	-	87.82	93.61	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Pembakuan Nama Rupa-Rupa Bumi	67,752,800	51,958,000	-	-	-	55,248,200	42,658,000	-	-	-	81.54	82.10	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah	124,370,000	46,353,350	-	-	-	114,361,200	46,118,400	-	-	-	91.95	99.49	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	100,000,000	59,799,650	-	-	-	98,165,550	59,607,650	-	-	-	98.17	99.68	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional	178,000,000	30,800,000	-	-	-	152,292,000	24,965,000	-	-	-	85.56	81.06	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Kecamatan	85,122,000	45,000,000	-	-	-	52,174,000	44,817,400	-	-	-	61.29	99.59	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kubu Raya	145,000,000	12,400,000	-	-	-	142,721,000	12,400,000	-	-	-	98.43	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kehutanan	72,670,000	31,475,950	-	-	-	68,720,600	31,445,200	-	-	-	94.57	99.90	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatannya	72,670,000	31,475,950	-	-	-	68,720,600	31,445,200	-	-	-	94.57	99.90	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Penataan Kecamatan / Kelurahan	184,000,000	-	-	-	-	117,518,550	-	-	-	-	63.87	0.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Pemeloran Kecamatan	64,000,000	-	-	-	-	15,899,000	-	-	-	-	24.84	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Pembentukan Kelurahan	120,000,000	-	-	-	-	101,619,550	-	-	-	-	84.68	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	3,062,562,605	3,550,635,250	-	-	-	2,974,452,000	3,477,964,950	-	-	-	97.12	97.95	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Formasi Jabatan PNS	71,264,800	46,956,050	-	-	-	70,950,800	46,361,250	-	-	-	99.56	98.73	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi	150,000,000	143,650,000	-	-	-	145,320,400	143,462,000	-	-	-	96.88	99.87	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja	22,843,700	3,430,500	-	-	-	22,757,400	3,430,500	-	-	-	99.62	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penataan, Monitoring dan Evaluasi SOPD Kabupaten Kubu Raya	134,603,200	54,968,000	-	-	-	132,598,500	54,668,000	-	-	-	98.51	99.42	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Rakortek Bidang Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Tingkat Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional	58,159,852	-	-	-	-	57,867,800	-	-	-	-	99.50	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

Kegiatan Penyusunan Data Base e-Formasi	47,556,500	49,151,500	-	-	-	47,242,500	46,727,500	-	-	-	99.34	95.07	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	28,470,000	17,963,700	-	-	-	28,470,000	17,963,700	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan	77,732,000	-	-	-	-	77,211,000	-	-	-	-	99.33	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	118,111,853	52,700,000	-	-	-	117,697,600	52,315,000	-	-	-	99.65	99.27	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Tangga Jabatan dan Pendukung Perkantoran	2,102,600,000	2,884,000,000	-	-	-	2,026,600,000	2,819,800,000	-	-	-	96.39	97.77	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Asistensi dan Penyusunan Evaluasi Jabatan	59,053,000	40,957,500	-	-	-	58,049,700	40,376,000	-	-	-	98.30	98.58	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	57,110,700	23,997,500	-	-	-	57,105,150	23,997,500	-	-	-	99.99	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	76,373,600	-	-	-	-	74,506,500	-	-	-	-	97.56	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas	58,683,400	4,889,150	-	-	-	58,074,650	4,889,150	-	-	-	98.96	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perencanaan dan Rumah Tangga Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	150,000,000	94,503,850	-	-	-	-	94,119,350	-	-	-	0.00	99.59	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik	-	5,129,500	-	-	-	-	5,129,500	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	-	77,334,000	-	-	-	-	74,334,000	-	-	-	-	96.12	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur	-	50,984,000	-	-	-	-	50,391,500	-	-	-	-	98.84	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama	2,097,614,050	753,145,650	-	-	-	1,910,624,750	675,947,350	-	-	-	91.09	89.75	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitasi Ibadah Haji	699,335,350	198,092,700	-	-	-	690,343,950	126,277,500	-	-	-	98.71	63.75	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Safari Keagamaan	664,942,850	149,374,650	-	-	-	568,982,850	146,540,000	-	-	-	85.57	98.10	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten	115,222,750	-	-	-	-	91,357,750	-	-	-	-	79.29	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi	57,846,300	-	-	-	-	54,216,300	-	-	-	-	93.72	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Umum Lainnya	560,266,800	260,840,700	-	-	-	505,723,900	260,068,050	-	-	-	90.26	99.70	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitasi Pengiriman Kontingen MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	-	144,837,600	-	-	-	-	143,061,800	-	-	-	-	98.77	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah	167,258,550	47,582,850	-	-	-	164,125,200	47,320,300	-	-	-	98.13	99.45	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Kubu Raya	92,258,550	-	-	-	-	90,702,300	-	-	-	-	98.31	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitasi, Monitoring dan Koordinasi SIRUP	75,000,000	13,707,900	-	-	-	73,422,900	13,707,900	-	-	-	97.90	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA)	-	33,874,950	-	-	-	-	33,612,400	-	-	-	-	99.22	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	303,455,200	113,118,400	-	-	-	296,036,900	112,179,600	-	-	-	97.56	99.17	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Monitoring dan Koordinasi Pengelolaan Usaha Daerah	73,888,600	-	-	-	-	71,888,600	-	-	-	-	97.29	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

Kegiatan Fasilitas Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kubu Raya	63,388,000	-	-	-	-	63,048,400	-	-	-	-	99.46	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kubu Raya	84,518,600	-	-	-	-	82,216,900	-	-	-	-	97.28	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas Monitoring dan Evaluasi Percepatan Akses Keuangan Daerah	81,660,000	16,325,000	-	-	-	78,883,000	16,325,000	-	-	-	96.60	100.00	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah	-	30,033,700	-	-	-	-	29,717,400	-	-	-	-	98.95	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas, Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Perekonomian Daerah	-	30,033,700	-	-	-	-	29,883,700	-	-	-	-	99.50	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas, Koordinasi dan Monitoring Potensi Unggulan Daerah	-	36,726,000	-	-	-	-	36,253,500	-	-	-	-	98.71	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Program Peningkatan Kinerja Badan Usaha Daerah	121,875,000	136,644,950	-	-	-	112,113,600	136,182,950	-	-	-	91.99	99.66	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fit and Proper Test Direktur PDAM Kabupaten Kubu Raya	121,875,000	-	-	-	-	112,113,600	-	-	-	-	91.99	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Seleksi Dewan Pengawasan PERUMDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya	-	109,594,000	-	-	-	-	109,134,500	-	-	-	-	99.58	-	-	-	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah	-	27,050,950	-	-	-	-	27,048,450	-	-	-	-	99.99	-	-	-	-100.00%	-100.00%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	-	-	9,870,284,311	-	-	-	-	9,772,145,799	-	-	-	-	99.006	0.00%	0.00%
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	-	-	9,870,284,311	-	-	-	-	9,772,145,799	-	-	-	-	99.006	0.00%	0.00%
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	-	-	-	9,870,284,311	-	-	-	-	9,772,145,799	-	-	-	-	99.01	0.00%	0.00%
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	-	-	177,285,703	135,642,600	106,200,037	-	-	173,551,200	132,941,476	104,360,403	-	-	97.89	98.01	98.268	-12.02%	-11.94%
Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	177,285,703	135,642,600	106,200,037	-	-	173,551,200	132,941,476	104,360,403	-	-	97.89	98.01	98.268	-12.02%	-11.94%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	-	-	177,285,703	135,642,600	106,200,037	-	-	173,551,200	132,941,476	104,360,403	-	-	97.89	98.01	98.27	-12.02%	-11.94%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	318,558,393	399,622,120	498,024,819	-	-	313,702,300	394,576,160	479,332,340	-	-	98.48	98.74	96.247	11.82%	11.18%
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	318,558,393	399,622,120	498,024,819	-	-	313,702,300	394,576,160	479,332,340	-	-	98.48	98.74	96.247	11.82%	11.18%
Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	148,036,646	-	-	-	-	142,817,200	-	-	-	-	96.47	0.00%	0.00%
Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	318,558,393	399,622,120	349,988,173	-	-	313,702,300	394,576,160	336,515,140	-	-	98.40	98.74	96.15	2.38%	1.77%
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	3,602,408,738	560,681,740	330,445,354	-	-	3,060,584,875	428,986,100	230,404,140	-	-	84.96	76.51	69.725	-44.97%	-47.62%

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3,602,408,738	560,681,740	330,445,354	-	-	3,060,584,875	428,986,100	230,404,140	-	-	84.96	76.51	69.725	-44.97%	-47.62%
Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	302,700,608	449,816,200	330,445,354	-	-	186,364,150	322,570,980	230,404,140	-	-	61.57	71.71	69.73	2.22%	5.45%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3,299,708,130	110,865,540	-	-	-	2,874,220,725	106,415,120	-	-	-	87.11	95.99	0.00	-100.00%	-100.00%
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-	211,710,048	222,478,210	162,664,259	-	-	209,373,500	217,282,130	154,451,937	-	-	98.90	97.66	94.951	-6.38%	-7.32%
Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	211,710,048	222,478,210	162,664,259	-	-	209,373,500	217,282,130	154,451,937	-	-	98.90	97.66	94.951	-6.38%	-7.32%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	-	-	211,710,048	222,478,210	162,664,259	-	-	209,373,500	217,282,130	154,451,937	-	-	98.90	97.66	94.95	-6.38%	-7.32%
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-	-	-	-	57,945,699	-	-	-	-	57,940,860	-	-	-	-	99.992	0.00%	0.00%
Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-	-	-	57,945,699	-	-	-	-	57,940,860	-	-	-	-	99.992	0.00%	0.00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	-	-	-	-	57,945,699	-	-	-	-	57,940,860	-	-	-	-	99.99	0.00%	0.00%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-	327,488,562	465,976,660	481,733,953	-	-	326,618,260	454,328,322	413,741,934	-	-	99.73	97.50	85.886	10.13%	6.09%
Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hampirannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-	327,488,562	465,976,660	481,733,953	-	-	326,618,260	454,328,322	413,741,934	-	-	99.73	97.50	85.886	10.13%	6.09%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	-	-	327,488,562	465,976,660	481,733,953	-	-	326,618,260	454,328,322	413,741,934	-	-	99.73	97.50	85.89	10.13%	6.09%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	29,309,026,110	32,924,179,566	40,472,438,782	-	-	27,593,651,741	31,779,049,635	35,389,209,492	-	-	94.15	96.52	87.44	8.40%	6.42%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	85,925,300	175,637,600	193,302,990	-	-	84,805,600	175,288,600	190,635,822	-	-	98.70	99.80	98.62	22.47%	22.45%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	57,038,000	43,086,600	57,136,556	-	-	55,937,700	42,964,600	56,175,900	-	-	98.07	99.72	98.32	0.04%	0.11%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	35,064,700	33,296,385	-	-	-	34,887,700	32,719,660	-	-	-	99.50	98.27	-1.29%	-1.59%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	47,065,200	46,006,094	-	-	-	47,033,200	45,837,960	-	-	-	99.93	99.63	-0.57%	-0.64%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	4,733,056	-	-	-	-	4,726,402	-	-	-	99.86	0.00%	0.00%	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	-	6,690,221	-	-	-	-	6,677,700	-	-	-	99.81	0.00%	0.00%	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ilhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	28,887,300	50,421,100	45,440,678	-	-	28,867,900	50,403,100	44,498,200	-	-	99.93	99.96	97.93	11.99%	11.42%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	12,906,553,278	13,976,326,281	15,742,654,298	-	-	11,916,743,787	13,210,331,148	14,330,791,960	-	-	92.33	94.52	91.032	5.09%	4.72%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	12,467,434,928	13,627,189,981	15,227,825,481	-	-	11,499,641,187	12,862,440,992	13,828,447,834	-	-	92.24	94.39	90.81	5.13%	4.72%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	373,210,270	253,569,400	423,315,498	-	-	351,308,500	252,519,256	413,136,996	-	-	94.13	99.59	97.60	3.20%	4.14%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	26,636,830	39,766,700	38,149,387	-	-	26,536,700	39,614,700	37,228,894	-	-	99.62	99.62	97.59	9.40%	8.83%

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	39,271,280	55,800,200	53,363,932	-	-	39,257,400	55,756,200	51,978,236	-	-	99.96	99.92	97.40	7.97%	7.27%	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	76,660,329	-	-	-	-	56,800,100	-	-	-	-	74.093	0.00%	0.00%	
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	76,660,329	-	-	-	-	56,800,100	-	-	-	-	74.09	0.00%	0.00%	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	60,788,000	236,227,000	137,258,000	-	-	60,771,450	235,626,080	125,850,000	-	-	99.97	99.75	91.689	22.58%	19.96%	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	182,670,000	80,850,000	-	-	-	182,670,000	80,850,000	-	-	-	-	100.00	100.00	-18.44%	-18.44%
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	60,788,000	53,557,000	56,408,000	-	-	60,771,450	52,956,080	45,000,000	-	-	99.97	98.88	79.78	-1.85%	-7.24%	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1,426,041,312	2,107,130,075	2,924,510,336	-	-	1,361,046,350	2,076,006,700	2,427,576,297	-	-	95.44	98.52	83.008	19.67%	15.56%	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	100,312,500	95,083,500	119,084,500	-	-	99,968,400	94,076,500	97,689,200	-	-	99.66	98.94	82.03	4.38%	-0.57%	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	749,498,752	1,253,215,515	1,358,942,146	-	-	748,296,100	1,224,913,400	1,224,910,350	-	-	99.17	97.74	90.14	16.04%	13.30%	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	-	-	64,587,060	67,587,060	59,468,200	-	-	64,486,260	67,481,800	59,152,300	-	-	99.84	99.84	99.47	-2.04%	-2.14%	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	78,734,000	-	-	-	-	23,807,500	-	-	-	-	30.24	-	0.00	-100.00%	-100.00%	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	432,909,000	691,244,000	1,007,623,000	-	-	429,488,100	689,535,000	976,950,397	-	-	99.21	99.75	96.96	23.52%	22.81%	
Sub Kegiatan Duluangan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	379,392,490	-	-	-	-	68,874,050	-	-	-	-	18.15	0.00%	0.00%	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1,771,646,195	1,806,395,819	2,173,784,585	-	-	1,767,215,900	1,751,176,150	1,612,312,970	-	-	99.75	96.94	74.171	5.25%	-2.27%	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	471,229,000	27,889,000	1,010,000,000	-	-	470,012,800	27,760,000	888,000,000	-	-	99.74	99.54	87.92	21.00%	17.24%	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	-	148,669,500	241,427,450	259,990,100	-	-	148,542,000	240,100,000	110,300,000	-	-	99.91	99.48	42.42	15.00%	-7.17%	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	978,379,655	1,438,634,969	850,074,485	-	-	975,293,300	1,385,396,150	560,292,970	-	-	99.68	96.30	65.91	-3.45%	-12.94%	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	173,368,040	98,444,400	53,720,000	-	-	173,367,800	97,920,000	53,720,000	-	-	100.00	99.47	100.00	-25.39%	-25.39%	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penujjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3,653,510,502	3,886,297,650	5,181,582,907	-	-	3,457,387,739	3,754,396,258	4,321,251,235	-	-	94.63	96.61	83.396	9.13%	5.73%	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	1,583,710,502	707,797,650	866,602,907	-	-	1,443,226,700	667,268,050	731,576,100	-	-	91.13	94.27	84.42	-13.99%	-15.62%	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	1,039,000,000	1,158,000,000	1,309,800,000	-	-	990,186,039	1,092,868,208	1,241,881,135	-	-	95.30	94.38	94.81	5.96%	5.83%	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	370,800,000	1,360,500,000	2,320,180,000	-	-	370,575,000	1,334,260,000	1,717,794,000	-	-	99.94	98.07	74.04	58.16%	46.73%	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	660,000,000	660,000,000	685,000,000	-	-	653,400,000	660,000,000	630,000,000	-	-	99.00	100.00	91.97	0.93%	-0.91%	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1,750,131,757	2,413,428,198	4,352,647,667	-	-	1,717,811,915	2,375,644,570	3,281,320,890	-	-	98.15	98.43	75.387	25.58%	17.56%	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	1,134,789,200	1,669,690,000	1,724,893,200	-	-	1,119,059,615	1,634,060,630	1,543,792,750	-	-	98.61	97.87	89.50	11.04%	8.38%	

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	363,542,557	342,968,198	1,848,715,467	-	-	360,210,300	342,295,100	1,079,511,340	-	-	99.08	99.80	58.39	50.17%	31.57%
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	251,800,000	400,750,000	779,039,000	-	-	238,542,000	399,288,840	658,016,800	-	-	94.73	99.64	84.47	32.63%	28.87%
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	1,626,580,428	1,506,281,786	1,984,496,638	-	-	1,378,829,645	1,468,799,626	1,848,284,335	-	-	84.77	97.51	93.136	5.10%	7.60%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	184,951,428	206,768,786	275,366,156	-	-	148,993,545	172,488,838	173,530,356	-	-	80.56	83.42	63.02	10.46%	3.88%
Sub Kegiatan Penyediaan Paksi Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	35,124,000	10,720,000	38,250,482	-	-	24,564,000	10,720,000	34,988,200	-	-	69.94	100.00	91.47	2.15%	9.25%
Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	1,406,505,000	1,288,793,000	1,670,880,000	-	-	1,205,272,100	1,285,590,788	1,639,765,779	-	-	85.69	99.75	98.14	4.40%	8.00%
Kegiatan Fasilitas Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	-	-	2,011,200,000	2,411,200,000	2,449,300,000	-	-	1,997,533,000	2,367,617,000	2,340,010,000	-	-	99.32	98.19	95.538	5.05%	4.04%
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	-	1,051,200,000	1,151,200,000	1,169,000,000	-	-	1,047,005,000	1,145,264,000	1,129,180,000	-	-	99.60	99.48	96.59	2.69%	1.91%
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	-	746,400,000	832,800,000	857,500,000	-	-	739,328,000	823,953,000	828,030,000	-	-	99.05	98.94	96.56	3.53%	2.87%
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	-	213,600,000	427,200,000	422,800,000	-	-	211,200,000	398,400,000	382,800,000	-	-	98.88	93.26	90.54	18.61%	16.03%
Kegiatan Penataan Organisasi	-	-	556,333,426	543,770,367	890,220,762	-	-	534,957,835	533,150,753	856,936,465	-	-	96.16	98.05	96.261	12.47%	12.50%
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	229,821,503	153,636,700	264,187,856	-	-	209,952,085	149,653,848	249,641,827	-	-	91.35	97.41	94.49	3.55%	4.42%
Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	163,281,160	158,243,627	175,723,292	-	-	162,959,400	157,626,225	168,324,021	-	-	99.80	99.61	95.79	1.85%	0.81%
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	163,230,763	231,890,040	223,476,919	-	-	162,046,350	225,870,680	214,407,290	-	-	99.27	97.40	95.94	8.17%	7.25%
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	-	140,708,004	-	-	-	-	138,799,382	-	-	-	-	98.64	0.00%	0.00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	-	86,124,691	-	-	-	-	85,763,948	-	-	-	-	99.58	0.00%	0.00%
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	3,460,315,912	3,861,484,790	4,366,020,270	-	-	3,316,548,520	3,831,012,750	3,997,439,418	-	-	95.85	99.21	91.558	5.98%	4.78%
Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolian	-	-	1,794,458,639	2,084,398,800	2,017,496,854	-	-	1,691,427,600	2,064,649,480	1,935,893,037	-	-	94.26	99.05	95.96	2.97%	3.43%
Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	-	-	1,017,692,000	1,128,364,000	1,581,645,100	-	-	1,011,711,800	1,126,538,900	1,560,545,729	-	-	99.41	99.84	98.67	11.65%	11.44%
Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	648,165,273	648,721,990	766,878,316	-	-	613,409,120	639,824,370	501,000,652	-	-	94.64	98.63	65.33	4.29%	-4.93%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	8,827,819,779	10,569,204,671	4,910,358,888	-	-	8,675,773,490	10,448,643,370	4,331,427,341	-	-	98.28	98.86	88.21	-13.64%	-15.94%
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	775,306,749	1,268,365,052	1,533,870,042	-	-	735,663,750	1,243,256,590	1,457,625,791	-	-	94.89	98.02	95.029	18.60%	18.64%
Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	-	-	182,146,320	364,655,422	421,592,506	-	-	182,007,500	360,127,350	414,121,774	-	-	99.92	98.76	98.23	23.34%	22.82%
Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	-	159,517,610	614,575,430	689,478,872	-	-	158,475,350	599,688,900	658,275,476	-	-	99.35	97.58	95.47	44.19%	42.76%
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	433,642,819	289,134,200	422,798,964	-	-	395,180,900	283,440,340	385,228,541	-	-	91.13	98.03	91.11	-0.63%	-0.64%
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	5,581,393,498	6,027,473,016	-	-	-	5,537,475,100	6,018,909,364	-	-	-	99.21	99.86	0.00	-100.00%	-100.00%

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	-	402,520,053	688,031,730	-	-	-	387,599,600	684,836,364	-	-	-	96.29	99.54	0.00	-100.00%	-100.00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	-	-	250,070,822	255,938,415	-	-	-	229,689,200	254,218,500	-	-	-	91.85	99.33	0.00	-100.00%	-100.00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	-	4,928,802,623	5,083,502,871	-	-	-	4,920,186,300	5,079,854,500	-	-	-	99.83	99.93	0.00	-100.00%	-100.00%
Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	-	-	949,116,890	1,362,925,713	1,649,632,348	-	-	915,334,400	1,330,219,230	1,463,921,711	-	-	96.44	97.60	88.74	14.82%	12.46%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	-	516,051,960	803,146,163	684,614,299	-	-	508,863,100	795,215,110	602,534,231	-	-	98.61	99.01	88.01	7.32%	4.31%
Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	-	-	292,369,540	290,319,670	652,738,024	-	-	267,716,700	268,687,000	560,258,500	-	-	91.57	92.55	85.83	22.24%	20.28%
Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	-	140,695,390	269,459,880	312,280,025	-	-	138,754,600	266,317,120	301,128,980	-	-	98.62	98.83	96.43	22.06%	21.37%
Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	-	-	1,522,002,642	1,910,440,890	1,726,856,498	-	-	1,487,300,240	1,856,258,186	1,409,879,839	-	-	97.72	97.16	81.64	3.21%	-1.33%
Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	-	-	1,391,565,550	1,747,284,460	1,634,727,539	-	-	1,364,666,000	1,719,943,180	1,332,698,724	-	-	98.07	98.44	81.52	4.11%	-0.59%
Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	-	-	-	13,023,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-100.00%	0.00%
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	-	130,437,092	150,132,950	92,128,959	-	-	122,634,240	136,315,006	77,181,115	-	-	94.02	90.80	83.78	-8.33%	-10.93%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	1,855,374,751	2,763,785,000	1,805,769,450	-	-	1,742,796,528	2,669,981,608	1,709,525,355	-	-	93.93	96.61	94.67	-0.68%	-0.48%
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	292,843,620	454,850,480	459,184,408	-	-	286,646,350	416,947,530	433,484,700	-	-	97.88	91.67	94.40	11.90%	10.89%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	-	134,187,730	215,103,800	223,876,236	-	-	129,849,950	177,815,270	206,393,900	-	-	96.77	82.66	92.19	13.65%	12.28%
Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	-	101,496,475	133,048,800	155,600,135	-	-	100,859,100	132,685,720	152,359,700	-	-	99.37	99.73	97.92	11.27%	10.86%
Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	-	57,159,415	106,697,880	79,708,037	-	-	55,937,300	106,446,540	74,731,100	-	-	97.86	99.76	93.76	8.67%	7.51%
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	98,583,960	230,008,560	315,345,646	-	-	95,937,650	228,909,400	289,707,411	-	-	97.32	99.52	91.87	33.74%	31.82%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	-	-	45,835,130	107,041,760	100,806,028	-	-	44,101,500	106,345,000	88,229,100	-	-	96.22	99.35	87.52	21.78%	18.93%
Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	-	58,192,467	-	-	-	-	57,270,011	-	-	-	-	98.41	0.00%	0.00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	52,748,830	122,966,800	156,347,151	-	-	51,836,150	122,564,400	144,208,300	-	-	98.27	99.67	92.24	31.21%	29.15%
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	1,260,395,163	1,707,785,710	620,587,282	-	-	1,161,452,625	1,662,843,690	595,538,837	-	-	92.15	97.37	95.96	-16.23%	-15.38%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	870,036,350	1,168,850,300	187,171,392	-	-	772,925,300	1,125,455,190	178,360,133	-	-	88.84	96.29	95.29	-31.90%	-30.69%
Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	-	-	220,317,390	282,342,250	288,696,490	-	-	219,234,525	281,980,300	276,364,055	-	-	99.51	99.87	95.73	6.99%	5.96%
Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	170,041,423	256,593,160	144,719,400	-	-	169,292,800	255,408,200	140,814,649	-	-	99.56	99.54	97.30	-3.95%	-4.50%
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	203,552,008	371,140,250	410,652,114	-	-	198,759,903	361,280,988	390,794,407	-	-	97.65	97.34	95.16	19.18%	18.41%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-	-	65,221,155	105,672,090	164,432,228	-	-	63,163,200	99,346,478	157,150,678	-	-	96.84	94.01	95.57	26.01%	25.59%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	-	67,348,523	120,451,950	103,397,268	-	-	66,624,783	120,079,564	100,422,548	-	-	98.93	99.69	97.12	11.31%	10.80%

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-	70,982,330	145,016,210	142,822,618	-	-	68,971,920	141,854,946	133,221,181	-	-	97.17	97.82	93.28	19.10%	17.89%
TOTAL	40,571,480,855	28,499,217,700	44,629,672,084	48,041,570,567	58,695,865,552	37,529,400,846	27,487,185,531	42,096,051,894	46,525,788,801	52,642,539,601	92.50	96.45	94.32	96.84	89.69	9.67%	8.83%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Eksistensi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis serta menyelenggarakan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup tugas.

1. Masalah Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan, sehingga penerapan *“the right man on the right place”* belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/provinsi dan institusi lain sesuai dengan bidang kewenangannya.

Sebagai informasi bahwa jumlah sumber daya manusia dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) berjumlah 102 (seratus dua) orang hal ini masih dirasa sangat kurang dengan jumlah 11 (sebelas) Bagian. Kekurangan ini didasarkan juga pada banyaknya jumlah Petugas Pendukung Kegiatan dalam hal ini pegawai non ASN yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2. Masalah Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja pada setiap bidang pemerintahan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berusaha melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan

sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja yang efektif dan efisien.

Selain perlengkapan dan peralatan kantor, kondisi ruangan yang terbatas juga mempengaruhi dari kualitas kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Beberapa diantaranya ketidaksesuaiannya jumlah orang dengan luas ruangnya yang ditempati, ada ruangan dengan luas kecil namun berisi jumlah orang yang banyak dan sebaliknya.

3. Masalah Sistem dan Prosedur

Adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Adanya perbedaan dalam pemahaman sistem dan prosedur yang baru berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pencapaian target kinerja.

Selain aturan terkait struktur organisasi, aturan terkait perencanaan dan keuangan juga berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dimana dengan keluarnya sistem atau aplikasi terbaru dalam pelaksanaan kegiatan mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian kembali dalam penggunaan sistem tersebut.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap sistem dan prosedur yang baru adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau kesenjangan antara yang ideal dan yang belum ideal yang kemudian akan diintervensi melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah, sedangkan isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan/dikedepankan atau suatu permasalahan yang strategis yang akan diintervensi melalui tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dari 11 (sebelas) Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki permasalahan dalam hal pelayanan yang kompleks. Masing-masing bagian memiliki permasalahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan. Tidak hanya faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan khususnya pelayanan. Pemetaan permasalahan pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD	Bagian
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen LPPD/LKPj SKPD, Dokumen LKjIP SKPD	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Bagian	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Penyampaian data dukung yang tidak tepat waktu	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Bagian	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Penyampaian Data Dukung yang tidak tepat waktu	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja)	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	1. Kualitas SDM dalam penyusunan data perencanaan	Bagian Perencanaan dan Keuangan

			3. Data Dukung dari seluruh Bagian		2. Penyampaian data yang tidak tepat waktu	
Perencanaan Keuangan	APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Fasilitasi Penyusunan DPA 3. Data Dukung (RKA) dari Bagian 4. Pemahaman Bagian Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	1. Sistem Operasi Perencanaan Anggaran dan Penatausahaan Keuangan 2. Peraturan terkait perencanaan keuangan	1. Kurangnya Pemahaman Bagian tentang penyusunan perencanaan Keuangan 2. Belum tertampungnya keseluruhan standar harga satuan di sistem operasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penatusahaan Keuangan	Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Bagian	1. Sistem Operasi Perencanaan Anggaran dan Penatausahaan Keuangan 2. Peraturan terkait penatausahaan keuangan	1. Kurangnya Pemahaman SDM tentang penyusunan dokumen pertanggung jawaban berdasarkan aturan yang berlaku	Bagian Perencanaan dan Keuangan

					2. Kurangnya Pemahaman SDM tentang penyusunan dokumen pertanggung jawaban terkait kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi	
Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa	<p>1. Dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang / jasa yang masih tidak sesuai target</p> <p>2. Perangkat Daerah yang melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik 68,47%,</p>	<p>1. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</p> <p>2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan</p>	<p>1. Kurangnya kompetensi yang dimiliki pelaku pengadaan</p> <p>2. Kurangnya Bimbingan teknis pengadaan Barang / Jasa untuk PPBJ</p> <p>3. Rapat Koordinasi dan monev Pengadaan barang / jasa yang masih minim anggaran</p> <p>4. Sistem / Aplikasi (berbagi pakai) pelaporan realisasi</p>	<p>1. Minimnya Anggaran untuk Diklat dan Uji Kompetensi.</p> <p>2. Tidak dilibatkannya Bagian Pengadaan Barang / Jasa dalam TAPD (khusus reuiu perencanaan pengadaan)</p> <p>3. Minimnya Anggaran pemeliharaan / maintenance untuk aplikasi (berbagi pakai)</p>	<p>1. Perangkat Daerah tidak tepat waktu dalam menginput SIRUP</p> <p>2. Penetapan metode pengadaan yang tidak tepat</p> <p>3. Kurangnya pengetahuan dalam Penyusunan KAK / Spesifikasi teknis</p>	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

	<p>masih 31,53% pengadaan dilakukan secara manual tidak melalui SPSE</p>	<p>Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>3. Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa</p> <p>4. Standar Dokumen Pemilihan</p>	<p>pengadaan barang / jasa.</p> <p>5. Pendampingan kepada PPK / PPBJ Perangkat Daerah</p>		<p>4. Rancangan kontrak, SSUK dan SSKK yang masih kurang tepat</p> <p>5. Masih kurang maksimalnya PPK dalam pengelolaan kontrak dan pencatatan e-kontrak</p>	
--	--	--	---	--	--	--

<p>Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</p>	<p>Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</p>	<p>1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>1. Pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang / jasa, dan infrastrukturnya 2. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang / jasa</p>	<p>1. Perangkat Daerah 2. Penyedia 3. LKPP</p>	<p>1. Keterbatasan pemahaman pengguna terhadap sistem 2. Pelatihan yang kurang untuk pengguna 3. Perubahan regulasi atau kebijakan yang memerlukan penyesuaian. 4. Kekurangan fitur yang diinginkan oleh pengguna. 5. Keterbatasan perangkat layanan LPSE</p>	<p>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p>
--	--	--	--	--	---	---

		3. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya				
Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Masih minimnya pelaksanaan pembinaan pelaku pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	1. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 2. Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun	1. Ketersediaan anggaran dalam melaksanakan pembinaan 2. Tidak tersedianya SDM internal yang memiliki kompetensi sebagai Narasumber / Tenaga Ahli	1. Tidak memiliki kewenangan secara mandiri dalam menyelenggarakan pembinaan terkait pengembangan kompetensi pelaku pengadaan 2. Hanya memiliki kewenangan menyelenggarakan pembinaan terkait bimtek / sosialisasi	Kurang terfasilitasinya pembinaan untuk pelaku pengadaan yang ada di perangkat daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

		2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa 3. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		/ diseminasi (dalam lingkup yang terbatas)		
Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan	Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan	Permenpan RB Nomor 01 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 34 Tahun 2013	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah	Data Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah	Proses penyusunan Analisi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan memakan waktu yang sangat panjang	Bagian Organisasi
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi	Data Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah	Terbatasnya kemampuan Perangkat Daerah menyusun kompetensi teknis	Bagian Organisasi

			3. Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah		untuk seluruh jabatan	
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen Peraturan daerah tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah	PP Nomor 18 Tahun 2016	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Masih terdapat tugas dan fungsi di Perangkat Daerah yang tumpang tindih atau belum tepat ukuran dan tepat fungsi	Bagian Organisasi
Penyusunan Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah	Dokumen Peraturan SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Daerah tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Masih terdapat tugas dan fungsi di Perangkat Daerah yang tumpang tindih atau belum tepat ukuran dan tepat fungsi	Bagian Organisasi
Penyusunan Profil Kelembagaan	Dokumen Profil Kelembagaan	Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Terbatasnya kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun profil kelembagaan.	Bagian Organisasi

			3. Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah			
Penilaian Evaluasi Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 dan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Terbatasnya kemampuan Perangkat Daerah dalam melakukan penilaian mandiri.	Bagian Organisasi
Penyusunan Laporan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	Laporan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	1. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 2. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	1. Penyampaian data dukung yang tidak tepat waktu 2. Kurangnya Pemahaman SDM tentang penyusunan Laporan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	Bagian Organisasi

Penyusunan Tata Naskah Dinas	Dokumen Peraturan Bupati Tata Naskah Dinas	Permendagri Nomor 1 Tahun 2023	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi	-	Proses koreksi yang Panjang.	Bagian Organisasi
Penyusunan Peta Proses Bisnis	Dokumen Peta Proses Bisnis	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	1. Penyampaian data dukung yang tidak tepat waktu 2. Kurangnya Pemahaman SDM tentang penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis	Bagian Organisasi
Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023	1. Fasilitasi, monitoring dan evaluasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Terbatasnya kemampuan Perangkat Daerah dalam melakukan penilaian mandiri.	Bagian Organisasi

Penyusunan Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Road Map Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh OPD 	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian data dukung yang tidak tepat waktu 2. Kurangnya Pemahaman SDM tentang penyusunan dokumen rencana aksi road map reformasi birokrasi 	Bagian Organisasi
Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Perjanjian Kinerja dan Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara reuiu atas laporan kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh OPD 	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian data dukung yang tidak tepat waktu 2. Kurangnya Pemahaman SDM tentang penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja 	Bagian Organisasi

<p>Penyusunan Laporan TPID</p>	<p>Laporan TPID</p>	<p>1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten / Kota Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. SK Bupati Kubu Raya Nomor: 524</p>	<p>1. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Pendukung termasuk SDM.</p> <p>2. Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Monitoring, Koordinasi dan Konsultasi.</p> <p>3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi /HLM</p> <p>4. Jumlah APBD</p>	<p>1. Data dukung kegiatan maupun Anggaran dari seluruh stakeholder selaku Tim TPID</p> <p>2. Sinergitas oleh Para Kepala OPD dalam mendukung Program Pengendalian Inflasi.</p>	<p>1. Kualitas SDM dalam penyusunan laporan terbatas, sehingga penyusunan laporan baru bisa dibuat pada saat akhir tahun.</p> <p>2. Penyampaian data dukung oleh OPD yang tidak tepat waktu.</p> <p>3. Belum Optimal sinergisitas baik berupa data dukung maupun anggaran oleh para Anggota Tim dalam menjalankan program pengendalian inflasi</p>	<p>Bagian Pembangunan dan Perekonomian</p>
--------------------------------	---------------------	--	---	---	--	--

		/ Setda / 2023 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tanggal 9 Oktober 2023				
Penyusunan Laporan TPAKD	Laporan TPAKD	Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 162 / SETDA / 2022 Tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tanggal 25 Februari 2022	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi pusat dan daerah TPAKD 3. Data dukung dari seluruh Anggota TPAKD Kabupaten Kubu Raya	1. Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i> . 2. Sinergisitas oleh Para Kepala OPD dalam mendukung Program Percepatan Akses Keuangan Daerah.	Belum didukung melalui Program di setiap OPD terkait.	Bagian Pembangunan dan Perekonomian
Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat SKPD	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	1. Belum adanya Ruang Tunggu Tamu SKPD 2. Terbatasnya SDM Pelayanan Tamu	Bagian Umum
Penyusunan Dokumen Pakta Integritas	Dokumen Pakta Integritas	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	1. Kualitas SDM dalam penyusunan data perencanaan	Bagian Umum

			3. Data dukung dari seluruh ASN		2. Penyampaian data yang tidak tepat waktu	
Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Umum Kepegawaian (DUK) 2. Laporan SKP / e-Kinerja 3. Absensi Kepegawaian 4. Dokumen Cuti 5. Dokumen Kenaikan Berkala 6. Dokumen Kenaikan Pangkat 	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh ASN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website e-Kinerja 2. Peraturan terkait Kepegawaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah SDM menangani Kepegawaian SKPD 2. Kurangnya pemahaman ASN tentang pelaporan e-Kinerja 3. Penyampaian data yang tidak tepat waktu 4. Kurangnya data yang dibutuhkan 	Bagian Umum
Penyusunan Dokumen Tambahan Penghasilan Pegawai	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Bagian 	Peraturan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah SDM menangani Tambahan Penghasilan Pegawai 	Bagian Umum

					2. Penyampaian absensi ASN yang tidak tepat waktu	
Penyusunan Laporan Jadwal Kegiatan Pimpinan	Jadwal Kegiatan Pimpinan	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	1. Lambatnya penyampaian undangan kegiatan 2. Kurangnya koordinasi pada penetapan jadwal kegiatan 3. Mendadaknya penyampaian undangan kegiatan 4. Jadwal kegiatan tidak disertai undangan kegiatan 5. Kurangnya informasi kegiatan karena terkadang tidak disertai kontak yang dapat dihubungi	Bagian Umum

Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Data Umum Kepegawaian	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	Data dukung dari seluruh ASN	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Belum adanya Tenaga ASN yang di bawah Sub Koordinator Rumah Tangga SKPD Sekretariat Daerah	Bagian Umum
Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji	-	1. Fasilitasi 2. Koordinasi	Data Dukung dari Desa dan Kecamatan	1. Kurangnya personil pengolah data dalam pelaksanaan fasilitasi Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji 2. Monitoring dan Evaluasi yang masih kurang dilaksanakan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Lainnya	Dokumen Perjanjian Kerjasama	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi 2. Koordinasi dan Konsultasi	Data dukung untuk fasilitasi Kerjasama daerah dan Lembaga lainnya	Belum ditindak lanjutinya seluruh Kerjasama dengan perjanjian kerjasama	Bagian Kerjasama dan Pertanahan
Batas Wilayah	Batas Wilayah Kabupaten, dan Antar Kecamatan	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang	1. Fasilitasi 2. Koordinasi dan Konsultasi	Data dukung batas wilayah kecamatan dan desa	Sering terjadinya permasalahan	Bagian Tata Pemerintahan

		Tugas Pokok dan Fungsi	3. Pembinaan		tentang batas wilayah	
Produk Hukum Daerah, Pelayanan dan Kesadaran Hukum serta Publikasi Produk Hukum	Produk Hukum	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Publikasi 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Tenaga Penyusun Produk Hukum (<i>Legal Drafting</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penyusunan Produk Hukum di OPD 2. Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Taat kepada Peraturan Perundang-Undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Tenaga Publikasi 2. Belum Optimalnya Aplikasi JDIIH 3. Kurangnya Tenaga <i>Legal Drafting</i> 	Bagian Hukum
Pengamanan Aset Pertanahan milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Teknis Lapangan 2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 3. Koordinasi Internal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait 2. Sistem/Aplikasi dalam rangka Digitalisasi 	Kurangnya Sumber Daya Aparatur	Bagian Kerjasama dan Pertanahan

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan indikasi permasalahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) untuk pelaksanaan kegiatan;
2. Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur dalam proses pelaksanaan kegiatan baik secara administrasi maupun dalam penggunaan aplikasi/sistem;
3. Keterlambatan penyampaian data yang menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan terhambat;
4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan;
5. Masih banyaknya Standar Operasi Pelayanan (SOP) yang belum ditetapkan di perangkat daerah sehingga tidak memiliki alur yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan; dan
6. Masih belum dilaksanakannya hasil tindak lanjut pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Adapun kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut adalah:

1. Penambahan sumber daya aparatur dalam hal ini PNS dan/atau PPPK sesuai dengan kebutuhan dan kekurangan di perangkat daerah;
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keilmuan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berupa bimbingan teknis, seminar, dan workshop;
3. Penambahan dan perawatan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tugas dan fungsi;
4. Disusunnya Standar Operasi Pelayanan (SOP) pelaksanaan kegiatan;
5. Meningkatkan koordinasi antar bidang/bagian terkait dalam pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih intens agar *output* kegiatan dapat terwujud dan tepat sasaran.

3.2. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang pengaruhnya signifikan bagi perangkat daerah sehingga harus mendapatkan prioritas perhatian yang memadai dalam perencanaan program dan kegiatan. Sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan baik atau buruknya kinerja perangkat daerah. Jika isu tersebut berupa kelemahan/ancaman harus diantisipasi, dan jika isu tersebut berupa peluang/kekuatan dapat dimanfaatkan karena isu tersebut akan mengakibatkan perangkat daerah dapat meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Adapun isu-isu strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal di Sekretariat Daerah. Hal ini dapat dilihat dari alur pelayanan dalam beberapa kegiatan masih belum jelas sehingga lambatnya pelayanan di perangkat daerah. Faktor utama yang menjadi penyebab atas lambatnya pelayanan tersebut adalah masih adanya Standar Operasi Pelayanan (SOP) yang belum disusun.
2. Kualitas manajemen kinerja perangkat daerah yang perlu lebih dioptimalkan. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian target kinerja yang sering tidak sesuai atau tidak tepat waktu berdasarkan rencana aksi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga hal tersebut mempengaruhi persentase capaian kinerja pada perangkat daerah.
3. Perbedaan kebijakan pusat dan daerah. Hal ini dapat dilihat pada terdapatnya permasalahan atas pelaksanaan kegiatan akibat dari perbedaan aturan pusat dan daerah tersebut.
4. Masih banyaknya permasalahan dibidang pertanahan. Hal ini dapat dilihat dari belum banyaknya aset milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang belum memiliki legalitas hukum. Selain dari itu, masih banyaknya konflik masalah pertanahan yang melibatkan baik itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pihak Swasta/Perusahaan, hingga masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan dan sasaran pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026:

- a. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2. Sasaran

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026:

- a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
- b. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2023)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun	
										2025	2026
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
T.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IT.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)					Poin	B (62,13)	B (63,30)	B (63,89)
		IT.2	Opini BPK					Predikat	WTP	WTP	WTP
				S.1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IS.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	BB (78,30)	BB (78,50)	BB (79,80)
T.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IT.3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					Poin	Sangat Baik (86,32)	Sangat Baik (87,74)	Sangat Baik (88,45)
				S.2	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	IS.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	B (87,78)	B (89,78)	A (90,78)

Tabel 4.2
Cascading Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Meta Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator
Masih Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil Evaluasi Pelaksanaan AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya
			Opini BPK	Hasil Evaluasi Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)			
Masih Belum Maksimalnya Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kubu Raya	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2025-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan perangkat daerah.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Tujuan (1)		Sasaran (2)		Strategi (3)		Arah Kebijakan (4)	
T.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	S.1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	ST.1	Meningkatkan Koordinasi di Internal Perangkat Daerah	AK.1	Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
						AK.2	Sosialisasi Terkait Akuntabilitas Kinerja
T.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S.2	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	ST.2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Melalui Dukungan Sarana dan Prasarana	AK.3	Peningkatan Penyediaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Optimal
				ST.3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum dan Keprotokolan	AK.4	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Umum dan Keprotokolan yang Prima dan Meningkatkan Kemampuan Teknis Bidang Pelayanan Umum dan Keprotokolan
				ST.4	Optimalisasi Bantuan Hukum Kepada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa	AK.5	Pemberian Bantuan Hukum atas Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum

				ST.5	Optimalisasi Sistem Informasi Hukum Daerah	AK.6	Peningkatan Publikasi dan Konsultasi Produk Hukum Daerah melalui Sistem JDIH Kabupaten Kubu Raya
				ST.6	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	AK.7	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa melalui Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
				ST.7	Optimalisasi Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum	AK.8	Pemetaan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
				ST.8	Optimalisasi Penyelesaian Konflik dan Sengketa Masalah Pertanahan	AK.9	Pemanfaatan Digitalisasi dalam Proses Penyelesaian Konflik dan Sengketa Masalah Pertanahan
				ST.9	Meningkatkan Pengamanan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	AK.10	Pemanfaatan Digitalisasi dalam Melakukan Pemetaan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
						AK.11	Peningkatan Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> terkait baik Internal maupun Eksternal

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025-2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka perlu diimplementasikan kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
				Indikator	Satuan		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra							
							Tahun 2023	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
T 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Publik	S 2	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	2	1 0 4	0 4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Upaya Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan	%	100	100	438.809.898	100	482.690.888	100	921.500.785	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
				2	1 0 4	0 4 1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaksanaan Upaya Penyelesaian Kasus Pertanahan	Kasus	16	12	438.809.898	13	482.690.888	25	921.500.785	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
				2	1 0 4	0 0 1	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Berita Acara	12	12	374.341.014	13	411.775.116	25	786.116.130	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Kerjasama dan Pertanahan
				2	1 0 4	0 0 1	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	1	1	64.468.884	1	70.915.772	2	135.384.656	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Kerjasama dan Pertanahan
				2	1 0 5	0 5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Lahan yang difasilitasi	%	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.000.000.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

				2	1	1	2	0	Sub Kegiatan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen	1	1	380.000.000	1	380.000.000	2	760.000.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Kerjasama dan Pertanahan
T 1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	S 1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	4	0	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP	Poin	78,30	78,50	37.648.918.598	79,80	41.453.810.457	79,80	79.102.729.055	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
				4	0	0	2	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	13	193.302.990	12	212.633.289	25	405.936.279	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
				4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	57.136.556	2	62.850.212	5	119.986.768	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	33.296.385	1	36.626.024	2	69.922.409	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	46.006.094	1	50.606.703	2	96.612.797	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	4.733.056	1	5.206.362	2	9.939.418	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Perencanaan dan Keuangan

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

									4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	6.690.221	1	7.359.243	2	14.049.464	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Perencanaan dan Keuangan
									4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	45.440.678	6	49.984.746	12	95.425.424	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Perencanaan dan Keuangan
									4	0	0	2	0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	16.257.483.115	12	17.883.231.427	24	34.140.714.542	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
									4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	98	105	15.742.654.298	115	17.316.919.728	220	33.059.574.026	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Umum
									4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4836	5000	423.315.498	5000	465.647.048	10000	888.962.546	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Perencanaan dan Keuangan
									4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	38.149.387	1	41.964.326	2	80.113.713	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Perencanaan dan Keuangan

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	17	17	53.363.932	17	58.700.325	34	112.064.257	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Perencanaan dan Keuangan
									Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	117.510.533	1	129.261.586	2	246.772.119	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
									Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	117.510.533	1	129.261.586	2	246.772.119	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Umum
									Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Difasilitasi	Orang	98	105	314.613.932	115	346.075.325	220	660.689.257	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
									Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	2	10.000.000	2	11.000.000	4	21.000.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Umum
									Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	176.250.000	1	193.875.000	2	370.125.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Umum
									Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	2	53.363.932	2	58.700.325	4	112.064.257	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Umum

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

							4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.120.000.000	12	1.232.000.000	24	2.352.000.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Umum
							4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	Laporan	12	12	2.397.100.000	12	2.636.810.000	24	5.033.910.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Umum
							4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan	Laporan	12	12	550.000.000	12	605.000.000	24	1.155.000.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Umum
							4	0	0	2	0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan yang Dipelihara	Unit	175	175	3.757.959.639	175	4.133.755.603	350	7.891.715.242	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
							4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	54	54	1.670.599.300	54	1.837.659.230	108	3.508.258.530	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Umum
							4	0	0	2	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1.371.721.339	1	1.508.893.473	2	2.880.614.812	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Umum
							4	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	120	120	715.639.000	120	787.202.900	240	1.502.841.900	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Umum

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

							4	0	0	2	0	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	4	4	334.000.000	4	367.400.000	8	701.400.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Umum
							4	0	0	2	0	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi	OPD	37	37	516.724.893	37	568.397.382	74	1.085.122.275	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
							4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	6	6	172.250.208	6	189.475.228	12	361.725.436	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Organisasi
							4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	7	2	119.861.820	1	131.848.002	3	251.709.822	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Organisasi
							4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	142.371.702	1	156.608.872	2	298.980.574	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Organisasi
							4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	5	2	52.363.758	1	57.600.134	3	109.963.892	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Organisasi
							4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2	29.877.405	2	32.865.146	4	62.742.551	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Organisasi

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

						2 0 0 1	0 0 0 2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	3	692.212.812	3	761.434.093	6	1.453.646.905	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Tata Pemerintahan
						2 0 1	0 0 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	4	4	622.798.964	4	685.078.860	8	1.307.877.824	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Tata Pemerintahan
						2 0 2	0 0 2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	6.942.228.450	100	7.636.451.295	100	14.578.679.745	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
						2 0 2	0 0 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	4	4	1.458.776.500	4	1.604.654.150	8	3.063.430.650	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Kesejahteraan Rakyat
						2 0 2	0 0 2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	3	3	246.313.300	3	270.944.630	6	517.257.930	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Kesejahteraan Rakyat

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

							20041	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	12	12	1.628.093.704	12	1.776.102.222	24	3.404.195.926	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Kerjasama dan Pertanahan
							20042	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	0	1	55.000.000	1	66.000.000	2	121.000.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Kerjasama dan Pertanahan
							20043	Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	1	80.000.000	1	100.000.000	2	180.000.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Kerjasama dan Pertanahan
							4013	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	%	100	100	1.932.350.405	100	2.125.585.445	100	4.057.935.850	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
							2011	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah	%	100	100	510.000.000	100	561.000.000	100	1.071.000.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
							20011	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD, dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monev Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	1	210.000.000	1	231.000.000	2	441.000.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Pembangunan dan Perekonomian
							20012	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	2	200.000.000	2	220.000.000	4	420.000.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Pembangunan dan Perekonomian

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

								4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	1	100.000.000	1	110.000.000	2	210.000.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Pembangunan dan Perekonomian
								4	0	0	2	0	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	100	100	276.000.000	100	303.600.000	100	579.600.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
								4	0	0	2	0	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	1	1	75.800.000	1	83.380.000	2	159.180.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Pembangunan dan Perekonomian
								4	0	0	2	0	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	1	58.200.000	1	64.020.000	2	122.220.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Pembangunan dan Perekonomian
								4	0	0	2	0	Pengelolaan dan Evaluasi dan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	1	142.000.000	1	156.200.000	2	298.200.000	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Pembangunan dan Perekonomian
								4	0	0	2	0	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	OPD	37	37	677.933.978	37	745.727.375	74	1.423.661.353	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
								4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	180	100	198.565.950	120	218.422.545	220	416.988.495	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026

							4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	3	3	319.090.559	3	350.999.614	6	670.090.173	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
							4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	125	150	160.277.469	150	176.305.216	300	336.582.685	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
							4	0	0	2	0	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100	100	468.416.427	100	515.258.070	100	983.674.497	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
							4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	180.875.605	1	198.963.166	2	379.838.771	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Sumber Daya Alam
							4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	1	132.045.000	1	145.249.500	2	277.294.500	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Bagian Sumber Daya Alam

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya:

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil/manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Dari penjabaran diatas, Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Sasaran
 - a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
 - b. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Poin	BB (78,30)	BB (78,50)	BB (79,80)
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	B (87,78)	B (89,78)	A (90,78)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Output
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dokumen Izin Membuka Tanah	Dokumen	0	1	1
2	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten / Kota	Dokumen	0	1	1

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Outcome
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0,00	0,00	0,00
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100,00	80,00	80,00

3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	36,25	40,00	45,00
4	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada Kuartal Pertama	%	0,00	0,00	0,00
5	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	%	8,50	6,93	5,81
6	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	63,58	60,00	64,71

Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Perumusan perhitungan dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum:

$$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$$

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* tersedianya tanah untuk masyarakat:

$$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$$

3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi:

$$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$$

4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada Kuartal Pertama:

$$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$$

5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif:

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$$

6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan:

$$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$$

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat Daerah yang akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahunan. Penyusunan Rencana Strategis merupakan kegiatan dalam mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, kemana arah yang harus dituju organisasi dan bagaimana cara dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2025-2026 menjadi acuan bagi seluruh unsur/bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, karena:

1. Merupakan alat yang bermanfaat untuk menilai pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan mengukur seberapa besar pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2025-2026.
2. Memudahkan pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah pada akhir tahun 2026, karena dapat segera dilakukan perbandingan terbalik antara rencana dan realisasi dengan menggunakan lima indikator kinerja, yaitu: *input, output, outcomes, benefit* dan *impact*.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur dan alokasi dana anggaran melalui pendekatan kinerja serta prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan kehematan serta rasionalisasi, agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu, Sekretariat Daerah juga perlu menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan yang akuntabel dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA,**

YUSRAN ANIZAM, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196906031989031005